

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu penelitian. Dimana pada bagian ini akan dipaparkan keseluruhan data yang telah di peroleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Setelah peneliti melaksanakan penelitian di potoan laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yaitu calon kepala desa, tokoh masyarakat dan pemuda desa dengan melalui metode obsevasi,wawancara disertai dokumentasi yang mendukung. Berikut adalah paparan data mengenai fokus penelitian dengan judul “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Kiai Dalam Sukses Pemenangan Calon Kepala Desa Di Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan”

##### **1. Deskripsi Desa Potoan Laok**

Desa potoan laok merupakan desa yang terletak di madura jawa timur yang berkabupaten di pamekasan dan berkecamatan di palengaan yang memiliki 3 dusun yaitu dusun barat sebagai dusun paling barat kemudian dusun tengah serta dusun timur yang merupakan dusun paling timur di desa ini.kepala desa yang pertama di desa potoan laok sendiri bernama Sarwi.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Moh Erfan Efendy, “perangkat desa, Wawancara langsung” ( rojing,dusun tengah potoan laok,2024).  
Moh Erfan Efendy, “perangkat desa, Wawancara langsung” ( rojing,dusun tengah potoan laok,2024).

a) Kepemimpinan Desa Potoan Laok

Berikut nama-nama kepala desa di desa potoan laok dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang.<sup>71</sup>

**Tabel 2: Mantan Kepala Desa Dan Kepala Desa Potoan Laok**

No	Nama Kepala Desa	Tahun Memerintah	Priode
1	Sarwi	1987-1997	2
2	Muhammad kurdi (pj)	1997-1999	1
3	H. Rohman	2001-2009	2
4	Toif Wijaya	2009-2015	2
5	Hasan Busri	2015-sekarang	2 priode+ perpanjangan masa jabatan kepala desa

3. Tiga dusun desa potoan laok.<sup>72</sup>

**Tabel 3: Nama Dusun Dan Nama Kepala Dusun Desa Potoan Laok Sekarang**

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah Penduduk
1	Dusun Barat	Satrawi	1.499 jiwa
2	Dusun Tengah	Amrozi	2.626 jiwa
3	Dusun Timur	Nuraji	1.404 jiwa

Dari data yang telah di paparkan di atas,diketahui bahwasanya ada 3 dusun dengan jumlah masyarakat sebanyak 5.529 jiwa.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Moh Erfan Efendy, "perangkat desa, Wawancara langsung" ( potoan laok,2024).

<sup>72</sup> Moh Erfan Efendy, "perangkat desa, Wawancara langsung" (potoan laok,2024).

<sup>73</sup> Moh Erfan Efendy, "perangkat desa, Wawancara langsung" (potoan laok,2024).

## 2. Peran Kiai Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Potoan Laok

Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Potoan Laok, peran kiai tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, budaya, dan politik yang berkembang di masyarakat. Kiai di Madura bukan sekadar pemimpin agama yang mengajarkan nilai-nilai Islam di pesantren, tetapi juga figur berpengaruh yang dapat menentukan arah politik warganya. Keberadaan mereka dalam Pilkades sering kali menjadi faktor utama dalam menentukan hasil pemilihan, mengingat masyarakat memiliki kepercayaan yang mendalam terhadap fatwa dan petunjuk yang diberikan oleh kiai.<sup>74</sup> kiai juga berperan penting dalam pemilihan kepala desa di desa potoan laok ini sejak adanya pemilihan kepala di Indonesia diselenggarakan sejak di tetapkanya undang-undang nomor 5 tahun 1976 tentang desa yang kemudian berpedoman menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2024 yang juga merupakan perubahan dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang sejak tahun 2016 pemilihan kepala desa dilakukan serentak di setiap kabupaten.<sup>75</sup>

Di Potoan Laok, keterlibatan kiai dalam Pilkades tidak hanya sebatas memberikan restu kepada calon kepala desa, tetapi juga mencakup berbagai bentuk dukungan yang lebih aktif. Salah satu bentuk peran yang paling menonjol adalah memberikan nasihat dan bimbingan kepada calon kepala desa mengenai etika kepemimpinan dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Nasihat yang diberikan oleh kiai sering kali menjadi pedoman bagi calon kepala desa dalam menyusun strategi kampanye yang berbasis

---

<sup>74</sup> M. Imam Zamroni, "Agama, Etnis dan Politik dalam Panggung Kekuasaan: Dinamika Politik Tauke dan Kiai di Madura," (el Harakah: Jurnal Budaya Islam, Vol. 10 No. 1.)

<sup>75</sup> [https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024?utm\\_source](https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024?utm_source)

nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Selain itu, kiai berperan sebagai penengah jika terjadi konflik di antara pendukung calon kepala desa.<sup>76</sup> Pilkades sering kali memicu ketegangan, terutama di desa yang masyarakatnya memiliki hubungan sosial yang erat. Di sinilah kiai hadir sebagai sosok yang dihormati untuk meredam ketegangan dan memastikan pemilihan berjalan damai.

Kiai juga turut mempertimbangkan siapa yang layak menjadi kepala desa. Dalam beberapa kasus, kiai secara langsung memberikan dukungan kepada calon yang dianggap memiliki kepribadian dan rekam jejak baik. Dukungan ini sangat berpengaruh karena di Madura masyarakat masih kuat dengan budaya patronase, di mana keputusan kiai sering kali dijadikan pegangan. Dengan semua peran tersebut kiai bukan hanya menjadi saksi dalam Pilkades, tetapi juga aktor utama yang dapat memengaruhi jalannya pemilihan. Keberadaan beliau memastikan bahwa pemimpin desa yang terpilih tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga moral dan sosial di mata masyarakat.

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mereka ketahui dan pendapat mereka tentang fenomena yang terjadi terhadap *“peran kiai dalam proses pemilihan kepala desa di desa potoan laok”* wawancara pertama dilakukan kepada kepala desa terpilih yang bernama Hasan Busri berikut hasil wawancaranya:

---

<sup>76</sup> Muhammad Abdul Aziz, *Peran Kiai dalam Politik Lokal: Studi di Desa Kuala Mandor*, (Jurnal Aspirasi, Vol. 9, No. 2, 2018), 134.

“suatu kehormatan bagi saya dapat perintah dari guru (kiai) yang telah memberikan kepercayaan bagi saya untuk memimpin desa ini, di lihat dari pemimpin sebelum-sebelumnya juga desa ini memang desa yang baik yang di pimpin oleh klebun (kepala desa) yang juga memberikan kemajuan, dengan ini rasa saya mengemban amanat yang begitu berat karna adanya dukungan dari guru (kiai) langsung untuk memimpin desa ini, dan saya berjanji akan melakukan perubahan baik yang sudah bagus kita sempurnakan dan yang kurang kita tambah adapun peran kiai dalam pemilihan ini sangat penting, Pertama kiai mendukung salah satu paslon bukan karna kepentingan pribadi beliau di karnakan resah terhadap kejadian-kejadian yang biasanya terjadi dalam pemilihan kepala desa di madura ini, biasanya ada kekerasan bahkan ada pertumpahan darah setiap pemilihan kepala desa ini. maka dari itu kiai mengambil peran untuk meminimalisir hal tersebut terjadi.”<sup>77</sup>

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa kiai memiliki peran besar dalam pemilihan kepala desa di Desa Potoan Laok, bukan hanya dalam memberikan dukungan kepada calon tertentu, tetapi juga dalam menjaga ketertiban selama proses pemilihan. Kepala desa terpilih merasa bahwa mendapatkan restu dari kiai adalah sebuah kehormatan besar, tetapi di sisi lain juga menjadi tanggung jawab yang berat. Dukungan kiai membuatnya semakin termotivasi untuk membangun desa dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Selain itu, alasan kiai terlibat dalam pemilihan ini bukan karena kepentingan pribadi, melainkan karena kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat. Di Madura, Pilkades sering kali memicu konflik bahkan sampai terjadi kekerasan. Kiai turun tangan untuk mencegah hal ini agar pemilihan bisa berjalan lebih damai dan masyarakat tetap rukun. Seperti halnya jawaban dari bapak kepala desa tidak terpilih nomor urut 2 yang berasal dari dusun barat potoan laok atas nama bapak Mujib yang sebelumnya

---

<sup>77</sup> Hasan Busri, Kepala Desa Potoan Laok, Wawancara Langsung, (Potoan Laok 17 Januari 2024)

pernah menjadi perangkat desa dipemerintahan sebelumnya sekaligus menjadi guru di desa ini.

“motivasi saya menjadi kepala desa sebenarnya sama dengancalon-calon kepala desa dimana-mana tidak lain hanya untuk membangun desa lebih baik dan melakukan kemaslahatan untuk warga-warga desa, Dan beliau juga menyampaikan adanya dukungan kiai terhadap paslon nomor urut 1 tidak mempersalahkan hal tersebut dia menyampaikan “guruh lebbih taoh deri abe’ “ yang artinya guru lebih tahu dari saya sendiri.dan beliau juga menyampaikan tidak ada rasa iri terhadap itu semua karna memang dia mengaggap tujuan kiai melakukan hal ini karna demi kebaikan “*ommat*” (masyarakat).<sup>78</sup>

Dari wawancara ini,dapat kita tarik sedikit analisis perkataan dari bapak Mujib bahwa setiap calon kepala desa memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin membangun desa dan membawa manfaat bagi masyarakat. Meskipun kiai memberikan dukungan kepada calon tertentu, hal itu tidak menjadi masalah bagi calon lain. Ia justru menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, karena meyakini bahwa "guruh lebbih taoh deri abe'", yang berarti guru (kiai) lebih tahu dari dirinya sendiri. Sikap ini menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap kiai dan keyakinan bahwa keterlibatan mereka dalam Pilkades bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi demi kebaikan bersama. Hal ini semakin menegaskan bahwa peran kiai bukan hanya sekadar mendukung calon tertentu, tetapi juga menjaga persatuan dan memastikan pemimpin yang terpilih benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.

---

<sup>78</sup> Mujib Calon Kepala Desa Anomer Urut 2,Wawancara Langsung,(Potoan Laok 20 Januari 2025)

Kemudian peneliti juga mewawancarai H.Rohman sebagai mantan kepala desa terpilih priode sebelumnya yang sebelumnya juga mendapat dukungan dari kiai yang berasal dari dusun tengah kemudian peneliti menanyakan soal adanya peran kiai yang secara langsung mendukung salah satu calon kepala desa yang terjadi dalam pemilihan kepala desa ini.

“adanya dukungan tersebut membuat saya lebih berhati-hati dalam melakukan apa saja baik penggunaan dana desa, bertingkah laku dan mengambil keputusan karna saya merasa “tudus rajeh” malu yang sangat berat apabila salah mengambil keputusan dan kurang berhati-hati dalam bertindak apapun itu, karna saya telah diberikan kepercayaan dalam memimpin desa ini oleh guru (kiai).<sup>79</sup>

peneliti juga mewawancarai bapak nuraji sebagai kepala dusun desa potoan laok yang berasal dari kampung timur bapak nuraji menyampaikan :

“sebenarnya adanya sistem seperti ini membuat sistem demokrasi kita lebih aman karna kita tahu sendiri di madura khususnya sering kali ada perselisihan sehingga menimbulkan hal yang tidak kita inginkan, adanya trend seperti ini membuat desa jauh lebih aman dari risiko yang tidak kita inginkan dan tentunya lebih terjaga”.<sup>80</sup>

Lebih lanjut peneliti mewawancarai beberapa masyarakat desa yang berasal dari desa potoan laok yang juga berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa

“Pilkades tahun 2022 ini cukup sengit karna ada 2 calon yang sama-sama mempunyai kualitas yang baik, baik nomor urut 1 atau nomor urut 2 pasti keduanya memiliki tujuan yang sama sebenarnya hanya untuk membuat desa ini lebih baik dari tahun ke tahun, dan adapun adanya dukungan kiai kepada salah satu paslon menurut saya tidak menjadi masalah karna kiai ikut serta dalam kontestasi ini merupakan hal yang sangat baik, Karna demi kemaslahatan bersama dalam menjalankan proses pilkades ini

<sup>79</sup> H. Rohman, Mantan Kepala Desa Terpilih, Wawancara Langsung, (Potoan Laok 25 Januari 2025)

<sup>80</sup> Nuraji, Kepala Dusun Timur Wawancara Langsung, (Potoan Laok 10 Januari 2025)

adanya hal tersebut membuat orang-orang takut mas untuk macam-macam dalam proses pemilihan ini”.<sup>81</sup>

“saya tidak tahu apakah Cuma di desa ini fenomena ini terjadi karna yang saya dengar ada beberapa desa juga yang secara langsung kiai mengambil peran sebagai pendukung di pemilihan kepala desa ini Cuma yang saya ketahui jika ada hal yang seperti ini saya rasa “*jhe’ begusseh*” (sangat bagus sekali) karna saya juga berpikir hal ini dapat menghindari dari politik uang mas “*money politik*” yang terkadang membuat cacat sistem demokrasi, jadi hal ini ketika saya pertimbangkan ini adalah langkah yang baik”.<sup>82</sup>

selaras apa yang dikatakan oleh Nailul Karom bahwa hal ini bagus karna maraknya money politic yang sering terjadi di beberapa daerah lain yang hal tersebut merusak sistem demokrasi.

“fenomena seperti ini sebenarnya adalah sebuah kejadian yang sangat baik dimana kiai mengambil peran untuk masyarakat itu sendiri ,terkadang kita lupa dan menutup hal baik karna adanya politik uang (money politik) karna kita tahu di madura menghormati guru dan mengikuti saran guru/kiai adalah hal yang luar biasa karna saya yakin beliau jauh lebih tahu dari orang-orang seperti saya dan semoga hal ini terus berlanjut”.<sup>83</sup>

### **3. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Kiai Dalam Pemilihan Kepala Desa Potoan Laok**

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya sebatas aturan tertulis, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, ekonomi, dan kondisi sosial. maka dari itu perlu di teliti lebih lanjut mengapa sosiologi hukum yang terjadi pada masyarakat potoan laok penting untuk di tindak lanjuti sehingga dilakukan wawancara pada penetian ini untuk mengetahui faktor terjadinya sosiologi hukum yang terjadi pada desa potoan

<sup>81</sup> Kurnadi, Warga Desa Wawancara Langsung, (Potoan Laok 14 Januari 2025)

<sup>82</sup> Nailul Karom, Warga Desa Wawancara Langsung, (Potoan Laok 16 Januari 2025)

<sup>83</sup> Faizur, Warga Desa Wawancara Langsung, (Potoan Laok 16 Januari 2025)

laok kecamatan palengaan kabupaten pamekasan berikut petikan wawancaranya:

“orang sini rata-rata condong mengikuti perintah kiai mas dari pada hukum tertulis akan tatapi hukum ataupun undang-undang tentang pemilihan kepala desa ini tetap berjalan sesuai dengan prosedur baik dari pendaftaran sampai nanti pelantikan kepala desa, jadi Saya selaku warga desa ini selaku tim sukses saya selalu mendukung hal-hal baik untuk kemaslahatan desa ini, karna hal ini pun tidak melanggar aturan yang di tetapkan juga.”<sup>84</sup>

“saya juga sebagai tim sukses juga tidak memersalahkan hal tersebut karna memang benar kita mengikuti semua prosedur sehingga proses demokrasi tetap berjalan semestinya, karna saya paham hal ini tidak menyalahi aturan pilkades justru ketika saya “*eker pekker pole*” (dipikirkan secara matang) hal ini bagus untuk mengurangi yang namanya “*amain pesse*” (money politik) karna hal tersebut yang justru membuat demokrasi kita hancur dan cacat.”<sup>85</sup>

Dari penjelasan 2 di atas sebagai tim sukses paslon yang sama mereka mengatakan fenomena ini tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga tidak menyalahi aturan-aturan tentang pemilihan kepala desa karna hal tersebut mereka jalani seperti apa yang sudah di tetapkan seperti proses demokrasi yang tetap berjalan semestinya sehingga mereka tidak mengkhawatirkan konsekuensi aturan dan hukum apa yang mereka langgar. Karna semuanya sudah sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan. Dan pak Osman Ali juga menambahkan hal ini bagus untuk mengurangi terjadinya money politik yang sering terjadi di dunia perpolitikan di madura bahkan di daerah-daerah lain. Bapak Fathorrohman selaku masyarakat desa juga

---

<sup>84</sup> Mat Alih, Warga Desa *Wawancara Langsung*, (Potoan Laok 22 Januari 2025)

<sup>85</sup> Osman Ali, Warga Desa *Wawancara Langsung*, (Potoan Laok 22 Januari 2025)

menyatakan hal yang sedikit sama karna tersebut di latar belakang oleh *money politic* yang sangat marak terjadi. Berikut petikan wawancaranya:

“Adanya hal seperti ini saya rasa sangatlah menghindari yang Namanya politik uang *money politic*, karna saya tahu sendiri menurut cerita-cerita orang di daerah lain sangat marak yang namanya politik uang ini mas akan tetapi yang saya lihat tidak semua warga disini memilih dengan dasar mengikuti kiai ada sebagian memilih karna kedekatan keluarga atau keuntungan-keuntungan pribadi lainnya, Dan harapan saya semoga kiai bisa sering memberikan edukasi kepada masyarakat agar memilih pemimpin itu bukan soal keuntungan sesaat saja akan tetapi untuk masa depan yang lebih baik untuk desa ini.”<sup>86</sup>

Dalam wawancara ini peneliti menganalisis maraknya money politik juga yang membuat hal ini terjadi dan juga beliau menambahkan tidak semua orang mengikuti perintah kiai ada yang tidak mengikuti di sebabkan faktor keluarga dan juga faktor-faktor lain seperti kepentingan pribadi selaras apa yang di sampaikan oleh bapak Umam berikut hasil petikan wawancaranya:

“saya selaku warga desa sangat mengikuti apa yang kiai perintah yang pertama karna faktor adab dan yang ke dua karna faktor beliau adalah guru sehingga saya condong mengikuti apa yang beliau sarankan karna keabsahan yang beliau katakan tidak usah di pertanyakan lagi dan juga hal ini dapat mencegah adanya kecurangan dalam berpolitik seperti money politik yang sering kali terjadi.”<sup>87</sup>

Kemudian peneliti mewawancarai salah satu warga desa potoan laok yang berasal dari dusun timur bernama Abdussalam berikut hasil wawancaranya:

“Dalam setiap pemilihan kepala desa, peran kiai bukan hanya sekedar memberikan tausiyah atau nasihat agama, tetapi juga menjadi penjaga moral agar proses demokrasi berjalan denga adil dan bersih. Kalau kita bicara soal hukum formal, Tentu ada aturan dari pemerintah mengenai tata cara Pilkades, seperti siapa yang boleh mencalonkan diri, Bagaimana proses pemilihannya, Dan sebagainya. Tapi kalau bicara hukum sosial di

<sup>86</sup> Fathorrohman , Masyarakat Desa, *Wawancara Langsung*, (Potoan Laok 21 Januari 2025)

<sup>87</sup> Umam , Masyarakat Desa, *Wawancara Langsung*, (Potoan Laok 21 Januari 2025)

sini lebih berlaku apa yang dikatakan oleh kiai. Masyarakat percaya bahwa kiai memiliki pandangan yang lebih luas tentang siapa yang layak memimpin desa. namun tidak semua orang mengikuti perintah kiai"<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara, dapat dilihat bahwa kiai memiliki peran penting sebagai penjaga moral dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat cenderung mengikuti arahan kiai karena faktor adab dan kepercayaan terhadap keilmuannya hukum dan beliau juga menambahkan bahwa hukum formal atau peraturan tentang tata cara pilkades ini tetap berjalan sesuai aturan namun hukum sosial condong lebih di ikuti dalam pemilihan kepala desa ini karna beliau menganggap kiai lebih memiliki pandangan yang luas tentang siapa yang layak memimpin desa dan tidak semua orang mengikuti perintah kiai. Bapak Abdul Ghafi juga menyampaikan bahwa tidak semua orang mengikuti perintah kiai berikut hasil petikan wawancaranya:

“untuk hal ini rata-rata masyarakat memang mengikuti perintah kiai tapi tidak semua, Jika saya kasih persentase mungkin sekitar kurang lebih 30% orang-orang yang tidak mengikuti perintah kiai,ada banyak faktor salah satunya mungkin karna domisili calon kepala desa yang 1 desa dengan masyarakat di daerahnya saya kasih contoh misalkan si fulan ini mencalonkan diri sebagai calon kepala desa yang berasal dari dusun tengah nah kebanyakan nanti biasanya orang-orang dari dusun tengah memilih si fulan ini karna faktor 1 dusun,nah yang kedua biasanya karna faktor kekecewaan terhadap pilihan kiai sebelumnya yang kurang memberikan kemaslahatan untuk masyarakat,tapi hal ini bukan salah kiai nya tapi salah kepala desanya yang kurang bisa menjalankan amanat dengan baik”.<sup>89</sup>

pemaparan di atas dapat di analisis bahwa menurut bapak abdul ghafi Meskipun kiai memiliki pengaruh besar dalam pemilihan kepala desa di Potoan Laok, tidak semua masyarakat selalu mengikuti arahan beliau. Sekitar kurang lebih 30% warga memilih berdasarkan pertimbangan lain, seperti kedekatan

<sup>88</sup> Abdussalam, Masyarakat Desa, *Wawancara Langsung*,(Potoan Laok 21 Januari 2025)

<sup>89</sup> Abdul Ghafi ,Masyarakat Desa, *Wawancara Langsung*,(Potoan Laok 12 Desember 2024)

geografis dengan calon atau pengalaman mereka terhadap kepemimpinan sebelumnya. Misalnya, warga dari satu dusun cenderung mendukung calon yang berasal dari wilayah mereka sendiri, karena merasa lebih mengenal dan percaya pada sosok tersebut. Selain itu, ada juga yang kecewa dengan kepala desa sebelumnya yang didukung oleh kiai, bukan karena kesalahan kiai, tetapi karena kepala desa tersebut dianggap tidak mampu menjalankan amanah dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peran kiai masih sangat kuat, masyarakat tetap memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan mereka berdasarkan pengalaman dan kepentingan masing-masing. Namun terdapat juga faktor lain yang membuat masyarakat tidak mengikuti kiai seperti apa yang di katakan oleh ibu Misbahah berikut hasil petikan wawancaranya:

“tidak semua orang mengikuti arahan kiai karna berbagai alasan yang saya ketahui adalah faktor-faktor kecil sampai ke faktor-faktor besar contoh faktor-faktor kecil seperti orang-orang memikirkan sendiri dan menganalisis sendiri mana calon yang patut di pilih Adapun faktor-faktor besarnya mas misalkan karna kepentingan pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun insentif dan lainnya”.<sup>90</sup>

dari petikan wawancara di atas peneliti dapat sedikit menganalisis bahwa salah satu faktor yang menjadi masyarakat tidak mengikuti saran kiai adalah faktor kepentingan pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan.ketidaktahuan soal politik juga membuat masyarakat condong mengikuti saran dari kiai seperti apa yang di sampaikan oleh ibu Sudesi berikut hasil dari petikan wawancaranya:

---

<sup>90</sup> Misbahah ,Masyarakat Desa,*Wawancara Langsung*, ( Potoan Laok 29 Januari 2025)

“Saya sebagai ibu rumah tangga tidak terlalu paham politik, tapi kalau sudah pemilihan kepala desa, saya lebih nyaman mengikuti saran kiai. Soalnya beliau lebih mengerti siapa yang layak memimpin. Saya juga lihat kalau kiai berbicara, masyarakat lebih mendengar, meskipun tetap ada yang memilih karena faktor lain, dan kiai juga tidak memaksa masyarakat desa untuk mengikuti saran beliau, kiai membebaskan siapa saja yang ingin masyarakat pilih sesuai dengan keinginan masing-masing dan hati Nurani masing-masing jadi setau saya begitu saja.”<sup>91</sup>

dari pemaparan di atas dapat di lihat bahwa beliau menyampaikan tetap menjadikan kiai sebagai panutan dalam menentukan pilihan saat pemilihan kepala desa. Kiai dianggap lebih mengetahui siapa yang pantas memimpin, sehingga banyak warga yang mengikuti sarannya. Namun, kiai tidak pernah memaksakan kehendaknya. Beliau membiarkan masyarakat memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa peran kiai bukan untuk mengendalikan, tetapi lebih sebagai pembimbing yang dihormati oleh masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan desa.

Peneliti juga menganalisis 2 warga desa Nur Anisa Dan Ianatul yang merupakan mahasiswi yang berasal dari desa Potoan Laok berikut hasil petikan wawancaranya:

“selagi ini tidak melanggar peraturan tentang pemilihan kepala desa saya nilai ini tidak apa-apa karna memang hal ini lebih memberikan hal positif bagi saya salah satunya adalah mengurangi hal-hal negatif terjadi yang pasti sampean paham lah di daerah daerah lain yang ada di madura masih ada beberapa kejadian seperti adanya kekerasan fisik bahkan adanya ancaman terhadap paslon lain yang ingin mencalonkan dirinya sebagai calon kepala desa, tidak hanya calonya saja akan tetapi kadang juga kepada keluarganya, dan bagian-bagian tim suksesnya yang juga menjadi target incaran mereka dari kubu lain maka dari itu hadirnya kiai ini membuat situasi demokrasi kita lebih harmonis baik bagi masyarakat dan calon kepala desanya.”<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Sudesi, Masyarakat Desa, *Wawancara Langsung*, (Potoan Laok 29 Januari 2025)

<sup>92</sup> Nur Anisa, Masyarakat Desa, *Wawancara Langsung*, (Potoan Laok 31 Januari 2025)

sedikit mempunyai keselarasan dengan apa yang di sampaikan di atas  
Ianatul juga menyampaikan hal yang serupa akan tetapi ada beberapa  
tambahan berikut hasil petikan wawancaranya:

“adanya fenomena seperti ini membuat saya sedikit bersyukur pertama karna jelas pemilihan kepala desa ini minim terjadi konflik di beberapa tahun belakangan ini, kemudian yang kedua hal ini tidak melanggar aturan yang berlaku semua mekanisme sesuai dengan aturan pemerintah dalam pemilihan ini salah satunya yang saya ketahui kalo tidak salah calon kepala desa harus mempunyai umur lebih dari 25 tahun, namun faktor untuk saya sendiri memilih kepala desa ini tidak karna ikut-ikutan perintah kiai saya juga mempertimbangkan visi dan misi calon kedepannya untuk desa ini, tapi menurut pengalaman saya calon yang di usung kiai lebih memiliki kepribadian yang lebih baik dari calon yang lain sehingga besar kemungkinan masyarakat condong mengikuti saran kiai dalam memilih pertama karna faktor guru yang kedua karna faktor kualitas dari calon yang di usung kiai.”<sup>93</sup>

Dari wawancara ini dapat dilihat bahwa peran kiai dalam pemilihan kepala desa di Potoan Laok membawa dampak positif bagi proses demokrasi di tingkat desa. Salah satu manfaat yang paling dirasakan adalah berkurangnya potensi konflik dan kekerasan yang sebelumnya sering terjadi dalam pemilihan kepala desa di Madura. Keberadaan kiai sebagai figur yang dihormati membuat suasana pemilihan menjadi lebih kondusif baik bagi masyarakat maupun para calon kepala desa beserta tim pendukungnya. Peran kiai dalam pemilihan kepala desa di Potoan Laok membawa dampak positif bagi proses demokrasi di tingkat desa. Salah satu manfaat yang paling dirasakan adalah berkurangnya potensi konflik dan kekerasan yang sebelumnya sering terjadi dalam pemilihan kepala desa di Madura. Keberadaan kiai sebagai figur yang dihormati membuat suasana

---

<sup>93</sup> Ianatul, Masyarakat Desa *Wawancara Langsung*, (Potoan Laok 31 Januari 2025)

pemilihan menjadi lebih kondusif, Baik bagi masyarakat maupun para calon kepala desa beserta tim pendukungnya.

Dari perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menggambarkan bagaimana norma sosial dan nilai agama dapat berjalan beriringan dengan aturan formal dalam demokrasi desa. Peran kiai dalam Pilkades bukanlah bentuk intervensi politik yang melanggar aturan, tetapi lebih sebagai mekanisme sosial yang menjaga stabilitas dan mengarahkan masyarakat ke pilihan yang dianggap lebih maslahat bagi desa. Dengan demikian, pemilihan kepala desa di Potoan Laok menjadi contoh bagaimana tradisi dan demokrasi dapat berjalan selaras tanpa menghilangkan kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

## **B. Temuan Penelitian**

Temuan penelitian berupa data lapangan melalui pengumpulan data secara kualitatif. Berdasarkan paparan data diatas maka temuan pada penelitian adalah sebagai berikut.

### **1. Peran Kiai Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Potoan Laok**

- a) Kiai sebagai Penentu Arah Politik Di Desa Potoan Laok, keputusan kiai dalam Pilkades sangat berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. Bukan sekadar pemuka agama, kiai menjadi sosok yang dipercaya sepenuhnya untuk memberikan arahan politik. Masyarakat Madura masih sangat menjunjung tinggi budaya patronase, di mana saran dan restu kiai dianggap sebagai petunjuk terbaik dalam menentukan pemimpin desa.
- b) Bimbingan dan Nasihat Kiai Membentuk Kepemimpinan yang Berbasis Nilai Agama Kiai tidak hanya sekadar mendukung calon kepala desa, tetapi juga memberikan arahan dan nasihat mengenai kepemimpinan yang

baik. Para calon kepala desa yang mendapat dukungan kiai cenderung menyusun strategi kampanye yang lebih etis, mengedepankan nilai-nilai agama yang berbasis keislaman dan kearifan lokal. Hal ini membuktikan bahwa peran kiai tidak hanya sebatas aspek politik, tetapi juga membentuk karakter calon pemimpin agar lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

- c) Kiai sebagai Penjaga Stabilitas dan Perdamaian dalam Pilkadaes Pilkadaes di Madura sering kali diwarnai ketegangan hingga berujung pada konflik antar pendukung.
- d) Dukungan Kiai Berdasarkan Kepedulian Sosial, Bukan Kepentingan Pribadi Beberapa pihak mungkin mengira bahwa kiai mendukung calon tertentu karena kepentingan pribadi, tetapi faktanya, alasan utama keterlibatan kiai adalah kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat.
- e) Amanah yang Berat bagi Kepala Desa yang Didukung Kiai Menjadi kepala desa dengan restu kiai bukan hanya sebuah kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar. Para kepala desa yang mendapat dukungan kiai merasa bahwa mereka harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal pengelolaan dana desa dan kebijakan pembangunan. Mereka merasa malu jika sampai mengecewakan kepercayaan kiai dan masyarakat.
- f) Keterlibatan Kiai Membantu Mencegah Politik Uang “*money politic*”

## **2. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Kiai Dalam Pemilihan Kepala Desa Potoan Laok**

- a) Kiai sebagai Panutan Utama dalam Pilkadaes Dalam masyarakat Potoan Laok, kiai bukan sekadar tokoh agama, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik. Arahan kiai dalam pemilihan kepala desa sering kali dijadikan pedoman oleh masyarakat, bukan hanya karena faktor keagamaan, tetapi juga karena kepercayaan terhadap kebijaksanaan dan keilmuan mereka.
- b) Proses Demokrasi Tetap Berjalan Sesuai Aturan Meskipun masyarakat cenderung mengikuti petunjuk kiai, pemilihan kepala desa tetap berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari tahap pendaftaran, pemungutan suara, hingga pelantikan, semuanya berjalan dalam koridor hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa pengaruh kiai tidak menggantikan sistem hukum, tetapi lebih memberikan arah moral dalam proses demokrasi.
- c) Tidak Semua Warga Mengikuti Arahan Kiai Meskipun kiai memiliki pengaruh besar, tidak semua masyarakat mengikuti arahan beliau secara mutlak. Sekitar kurang lebih 30% warga tetap memilih berdasarkan pertimbangan lain, seperti kedekatan geografis dengan calon kepala desa atau pengalaman mereka terhadap kepemimpinan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun norma sosial berperan kuat, masyarakat masih memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan politiknya.

- d) Menciptakan Suasana Pilkades yang Damai, Pemilihan kepala desa di banyak daerah sering kali diwarnai oleh konflik, baik antar pendukung calon maupun antar keluarga. Namun, di Potoan Laok, peran kiai justru menjadi faktor yang menjaga stabilitas sosial. Dengan adanya bimbingan moral dari kiai, suasana Pilkades menjadi lebih kondusif, minim perselisihan, dan lebih berorientasi pada kepentingan bersama.
- e) Kiai sebagai Pembimbing, Bukan Pemaksa Salah satu hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kiai tidak pernah memaksa masyarakat untuk memilih calon tertentu. Mereka hanya memberikan arahan dan nasihat berdasarkan pertimbangan moral dan kepentingan desa. Masyarakat tetap memiliki hak penuh untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Hal ini membuktikan bahwa peran kiai dalam Pilkades bukan sebagai pengendali politik, melainkan sebagai penjaga moral dan stabilitas sosial yang dihormati oleh masyarakat.
- f) Kiai dapat Menjaga Keharmonisan Sosial Keberadaan kiai dalam pemilihan kepala desa tidak hanya berdampak pada proses demokrasi, tetapi juga berperan dalam menjaga keharmonisan sosial di desa.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Peran Kiai Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Potoan Laok**

Fenomena peran kiai dalam proses pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Potoan Laok, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh kiai dalam menentukan arah politik dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Berdasarkan

wawancara dengan beberapa informan, Peran kiai di Desa Potoan Laok tidak hanya terbatas pada memberikan dukungan kepada salah satu calon, tetapi juga lebih jauh lagi, Kiai menjadi figur yang mengarahkan masyarakat dalam menentukan pilihan mereka, Serta menjaga ketertiban dan perdamaian selama proses Pilkades berlangsung. Hal ini terbukti dari pernyataan Kepala Desa terpilih, Hasan Busri, yang merasa sangat terhormat mendapatkan dukungan dari kiai, yang tidak hanya memberikan restu, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan Pilkades berjalan damai. Dalam konteks ini, dukungan kiai bukanlah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan lebih kepada upaya untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik yang sering terjadi dalam Pilkades di Madura. Ini menegaskan bahwa kiai berperan sebagai penjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang rawan terpecah akibat perbedaan pilihan politik.

Sebagaimana diungkapkan oleh calon kepala desa yang tidak terpilih, Bapak Mujib, meskipun kiai mendukung calon lain, hal itu tidak menjadi masalah baginya karena ia percaya bahwa kiai lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk masyarakat. Sikap lapang dada ini menunjukkan betapa besar rasa hormat masyarakat terhadap kiai. Keterlibatan kiai dalam Pilkades ini juga dipandang sebagai langkah positif untuk menghindari praktik politik uang, yang seringkali merusak kualitas pemilihan umum. Salah satu masyarakat yang diwawancarai bahkan menyatakan bahwa

peran kiai sangat penting dalam menjaga integritas Pilkades agar lebih terhindar dari praktik *money politic* yang mencoreng sistem demokrasi.

Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa kiai memiliki peran penting dalam membentuk karakter calon kepala desa. Melalui bimbingan dan nasihat yang diberikan, para calon kepala desa yang mendapat dukungan kiai cenderung menyusun kampanye yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Ini membuktikan bahwa peran kiai dalam Pilkades tidak hanya terbatas pada aspek politik semata, tetapi juga pada pembentukan karakter calon pemimpin yang lebih berbasis pada etika dan tanggung jawab sosial. Selain itu, dukungan kiai juga berfungsi sebagai kontrol sosial, memastikan bahwa kepala desa yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas untuk memimpin dan mengelola desa dengan bijaksana.

Peran kiai juga sangat penting dalam menjaga perdamaian dan mengurangi potensi konflik dalam Pilkades. Mengingat sejarah Pilkades di Madura yang sering diwarnai ketegangan, keterlibatan kiai menjadi faktor penentu dalam mencegah terjadinya bentrokan antar pendukung calon yang berbeda. Masyarakat lebih menghormati keputusan kiai dan lebih cenderung menjaga keharmonisan daripada terjerumus dalam perselisihan yang merugikan. Dalam hal ini, peran kiai sebagai penengah sangat vital untuk memastikan Pilkades berlangsung dengan aman dan damai.

Secara keseluruhan, Keterlibatan kiai dalam Pilkades di Desa Potoan Laok tidak hanya membantu dalam menciptakan proses pemilihan

yang damai dan adil, tetapi juga membantu dalam meminimalisir praktik politik uang yang sering merusak integritas pemilu. Keterlibatan kiai ini menunjukkan bagaimana budaya patronase di Madura sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat, di mana keputusan dan dukungan kiai menjadi hal yang sangat dihormati dan diikuti. Peran kiai yang demikian kuat juga berfungsi untuk menjaga sistem demokrasi agar tetap bersih dan terhindar dari hal-hal yang dapat merusaknya.

## **2. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Kiai Dalam Pemilihan Kepala Desa Potoan Laok.**

Dalam kajian sosiologi hukum, hukum bukan sekadar aturan tertulis yang mengikat, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh budaya, adat istiadat, serta norma yang berkembang di masyarakat. Satjipto Rahardjo dan Soerjono Soekanto menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial di sekitarnya. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana peran kiai dalam Pilkades di Potoan Laok bukan hanya sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga beriringan dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum yang dijalankan masyarakat tidak hanya bersandar pada regulasi formal, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai dan tradisi yang telah lama melekat dalam kehidupan mereka.

Kiai Merupakan Figur Sentral dalam Pilkades Masyarakat Potoan Laok masyarakat menganggap kiai sebagai sosok yang memiliki wawasan luas dan kepedulian tinggi terhadap kepentingan bersama. Oleh karena

itu, ketika kiai memberikan saran terkait calon kepala desa yang layak dipilih, banyak warga yang dengan sukarela mengikuti arahan tersebut. Fenomena ini mencerminkan konsep *living law*, yaitu hukum yang hidup di tengah masyarakat dan berakar dari kebiasaan serta norma yang berkembang. Di Madura, konsep "*bhepak, bhebhu, guru, rato,*" menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan "*guru*" sebagai guru (kiai), dan pemimpin formal sebagai sosok yang harus dihormati. Dalam Pilkades, kiai sebagai "guru" memiliki posisi yang sangat kuat dalam membentuk keputusan masyarakat.

Proses Demokrasi Tetap Berjalan Sesuai Aturan Meskipun peran kiai sangat dominan, proses Pilkades di Potoan Laok tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari pendaftaran calon, pemungutan suara, hingga pelantikan kepala desa, semuanya tetap mengikuti prosedur resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kiai tidak bersifat memaksa atau mencampuri aturan, melainkan lebih kepada memberikan panduan moral bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin yang dianggap terbaik. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya berupa aturan yang kaku, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik sosial yang telah lama berkembang. Dengan demikian, Pilkades di Potoan Laok menjadi bukti bahwa tradisi dan demokrasi dapat berjalan beriringan tanpa harus saling meniadakan.

adanya hal seperti ini dapat Mengurangi Politik Uang dalam Pilkades Salah satu dampak positif dari keterlibatan kiai dalam Pilkades

adalah berkurangnya praktik politik uang. *Money politic* masih menjadi tantangan serius dalam sistem demokrasi, termasuk di daerah Madura. Namun, di Potoan Laok, masyarakat lebih memilih untuk mengikuti nasihat kiai daripada menerima iming-iming uang dari calon kepala desa. Dalam hal ini, Teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) dari Roscoe Pound menjadi relevan. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dengan adanya nilai-nilai sosial dan keagamaan yang dijunjung tinggi, masyarakat Potoan Laok berhasil menjaga integritas pemilihan tanpa harus terpengaruh oleh politik uang.

Adapun dalam hal ini Masyarakat Tetap Memiliki Kebebasan Memilih Meskipun kiai memiliki pengaruh besar, penelitian ini menemukan bahwa tidak semua warga sepenuhnya mengikuti arahan mereka. Sekitar kurang lebih 30% masyarakat memilih berdasarkan pertimbangan lain, seperti kedekatan dengan calon kepala desa, pengalaman kepemimpinan sebelumnya, atau bahkan kepentingan pribadi. Sebagian warga lebih memilih calon dari dusunnya sendiri karena merasa lebih mengenal dan percaya kepada orang yang berasal dari lingkungan terdekatnya. Ada juga yang merasa kecewa dengan kepala desa sebelumnya yang didukung oleh kiai, sehingga mereka memutuskan untuk memilih calon lain. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kiai memiliki pengaruh besar, masyarakat tetap memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya.

Di banyak daerah, Pilkades sering kali menimbulkan konflik di antara pendukung calon. Namun, di Potoan Laok, peran kiai justru menciptakan suasana yang lebih damai. Kehadiran beliau membantu menenangkan masyarakat, mencegah gesekan yang tidak perlu, dan memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan tertib. Dalam sosiologi hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial. Kiai dalam hal ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan nilai-nilai demokrasi yang lebih santun dan bermartabat. Kiai sebagai Pembimbing, Bukan Pemaksa Salah satu hal yang menarik dari fenomena ini adalah bahwa kiai tidak pernah memaksakan pilihan kepada masyarakat. Mereka hanya memberikan panduan, sementara keputusan akhir tetap ada di tangan warga. Dengan demikian, Pilkades di Potoan Laok tetap berjalan dalam koridor demokrasi, tetapi tetap mengedepankan nilai-nilai sosial yang sudah mengakar kuat.

Dalam kajian sosiologi hukum, Hukum tidak hanya dimaksudkan untuk mengatur, tetapi juga untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik, Kiai tidak hanya membantu masyarakat dalam memilih pemimpin yang baik, tetapi juga memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan adil, damai, dan tetap menghormati kebebasan warga dalam menentukan pilihan mereka. Dengan demikian, Pilkades di Potoan Laok menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai tradisi dan demokrasi dapat berjalan

berdampingan. Keterlibatan kiai bukan sebagai alat politik, tetapi sebagai sosok yang menjaga moralitas dan ketertiban sosial dalam proses demokrasi di tingkat lokal.